

SKRIPSI



TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (Studi Kasus Putusan No. 281/Pid.B/2012/PN.Watampone)

OLEH
AHYAR BAKRI
B 111 09 313

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA
(Studi Kasus Putusan No. 281/Pid.B/2012/PN.Watampone)**

OLEH:

AHYAR BAKRI

B 111 09 313

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhirdalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
dalam Bagian Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa :

Nama : **AHYAR BAKRI**

No. Pokok : **B 111 09 313**

Bagian : **HUKUM PIDANA**

JudulSkripsi : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-
SAMA**

(Studi Kasus Putusan No.281/Pid.B/2012/PN.Watampone)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi.

Makassar, Juli 2013

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Muhadar, S.H.,M.S.
NIP. 19590317 198703 1 002

Abd. Asis, S.H.,M.H.
NIP. 19620618 198903 1 002

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Ahyar Bakri
Nomor Induk : B 111 09 313
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Pembunuhan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama
(Studi Kasus Putusan No.281/ Pid.B/2012
/PN.Watampone)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam Ujian Skripsi sebagai Ujian Akhir
Program Studi.

Makassar, Juli 2012

A.n. Dekan
Pembantu Dekan I,

Prof.Dr.Ir. Abrar Saleng,S.H.,M.H
NIP.19630419 198903 1003

ABSTRAK

Ahyar Bakri (B 111 09 313) “ Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama” (Studi Kasus Putusan No. 281/Pid.B/2012/PN.Watampone). Dibimbing oleh Bapak Muhadar selaku pembimbing I, dan Bapak Abd. Asis selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal, yaitu pertama, untuk mengetahui penerapan hukum materil dalam tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama, dan yang kedua, untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku.

Penelitian dilaksanakan di Watampone, yaitu di Pengadilan Negeri Watampone, dengan metode penelitian menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Dari penelitian yang dilakukan, Penulis mendapatkan hasil sebagai berikut, (1). dalam Putusan No. 281/Pid.B/2012/PN.Watampone, Jaksa Penuntut Umum menggunakan Dakwaan Alternative, yaitu dakwaan kesatu Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan dakwaan kedua Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana. diantara unsur-unsur Pasal yang didakwakan Oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan adalah Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1. Dimana, antara perbuatan dan unsur-unsur Pasal saling mencocoki. Dan menurut hemat Penulis penerapan hukum materil dalam kasus tersebut sudah sesuai dengan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. (2) dalam Putusan No. 281/Pid.B./2012/PN.Watampone. Proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut hemat Penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku karena berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti serta adanya pertimbangan-pertimbangan yuridis, hal-hal yang meringankan dan memberatkan.

UCAPAN TERIMA KASIH



Assalamu Alaikum Wr.Wb.

Syukur Alhamdulillah Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Sekalipun, Penulis menyadari bahwa di dalamnya masih banyak kekurangan-kekurangan, karena keterbatasan Penulis. Oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan berbagai masukan atau saran dari para penguji untuk penyempurnaannya. Salam dan Shalawat kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya-sahabatnya.

Dalam masa studi sampai dengan hari ini, Penulis sudah sampai pada tahapan akhir penyelesaian studi, begitu banyak halangan dan rintangan yang telah Penulis lalui. Banyak cerita yang Penulis alami, salah satunya terkadang jenuh dengan rutinitas kampus, terkadang lelah hadapi kehidupan di tanah orang lain, namun berkat sebuah cita-cita dan dengan harapan yang orang tua dan keluarga titipkan kepada Penulis, akhirnya Penulis dapat melalui semua itu dan tiba di hari ini dengan impian bahwa akan kembali ke tanah kelahiran dengan gelar S.H. dibelakang nama Penulis. Oleh karena itu,

dengan segala kerendahan hati Penulis haturkan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada ayahanda Mursalim dan ibunda Andi Niniyang tidak pernah mengeluarkan kata lelah membanting tulang mencari nafkah demi Penulis agar dapat terus melanjutkan studi. Apapun yang Penulis dapatkan hari ini belum mampu membalas jasa-jasa mereka, Penulis sadar bahwa hari ini adalah awal dimana Penulis harus membuktikan kepada kedua orang tua bahwa Penulis akan membalas jasa-jasa orang tua dan mempersembahkan yang terbaik buat beliau. Sekali lagi terima kasih banyak atas cinta dan kasih sayang yang diberikan.

Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudari Penulis (Dg.Nehoo, Dira Minnong, Uppunk, Sasa, Dilla, Adly) yang tidak dapat Penulis pungkiri bahwa mereka juga bagian dari motivasi dan semangat Penulis.

Dalam proses penyelesaian Skripsi ini, Penulis mendapat banyak kesulitan, akan tetapi kesulitan-kesulitan tersebut dapat dilalui berkat banyaknya pihak yang membantu, oleh karena itu Penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturusi Sp.BO selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta staf dan jajarannya.

2. Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H.,M.H.DFM. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Pembantu Dekan I, II, III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H.,M.H.DFM selaku pembimbing I dan Bapak Kaisaruddin Kamaruddin, SH. selaku pembimbing II yang telah mengarahkan Penulis dengan baik sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Bapak Prof. Dr. S.M. Noor, S.H., M.H. selaku Pembimbing akademik Penulis yang selalu membantu dalam program rencana studi.
5. Seluruh dosen, seluruh staf Bagian Hukum Pidana serta segenap civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu, nasihat, melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya.
6. Staff Kejaksaan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar yang membantu Penulis dalam masa penelitian.
7. Pajaruddin, S.H. yang telah menjadi spirit buat Penulis dalam menyelesaikan studi.
8. Kepada saudara-saudariku di IMHB yang selalu mengajarkan tentang "*Getteng, Lempu, Tettong Ri Ada Tongeng*". Terima kasih telah mengajarkan arti kebersamaan, arti persahabatan dan arti persaudaraan.

9. Keluarga besar KKN REGULER Gel.80 Kecamatan Sinjai Barat, khususnya Posko Desa Botolempangan, banyak cerita selama KKN.
10. Kepada saudara-saudariku di LP2KI banyak pelajaran yang dapat Penulis dapatkan, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi tersebut.
11. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Khususnya NOTARIS 08 yang tidak sempat Penulis sebutkan satu-persatu.
12. Sahabat terbaikku, Chicy, A.Wewe, Andrezt, yang selalu memberikan semangat kepada Penulis.
13. Kakak dan Adik-adikku tersayang Kak Uwha, Icha, Rhya M.R, Lisa, Feby, Putri yang selalu mendengarkan keluh kesahku, kalian adalah inspirasiku.
14. Kantin Ramsis 02, Hj.Noni yang selalu mengingatkan Penulis untuk kuliah, memberikan nasihat setiap waktunya.

Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, semoga kedepannya Penulis bisa menjadi lebih baik lagi.

WABILLAH TAUFIK WALHIDAYAH

Wassalamu Alaikum Wr.Wb.

Makassar, Mei 2012

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5

C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tindak Pidana.....	7
1. Pengertian Tindak Pidana.....	7
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	11
3. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	13
B. Tindak Pidana Pembunuhan	19
1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan	19
2. Jenis-jenis Pembunuhan.....	22
C. Pengertian Lingkup Rumah Tangga.....	32
D. Dasar Pertimbangan Hakim	36
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Lokasi Penelitian	40
B. Jenis dan Sumber Data.....	40
C. Teknik Pengumpulan Data	40
D. Analisis Data.....	41
BAB IV PEMBAHASAN.....	43
A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan yang Terjadi di Dalam Rumah	

Tangga (Studi Kasus Putusan No.	
606/Pid.B/2009/PN.Mks)	43
1. Posisi Kasus.....	43
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	45
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	51
4. Analisis Penulis	52
B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Pembunuhan Ynag terjadi di Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan No.	
606/Pid.B/2009/PN.Mks)	57
1. Pertimbangan Hakim	57
2. Amar Putusan	63
3. Analisis Penulis	64
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Hukum, sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUDNRI Tahun 1945) pada Pasal 1 ayat (3) “Negara Indonesia adalah Negara hukum”, tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*).

Negara hukum, hukum merupakan pilar utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Dalam artian bahwa sebuah negara dengan konsep negara hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas undang-undang (selanjutnya disingkat UU) yang berlaku untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Agar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUDNRI 1945 bahwa setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan.

Meskipun segala tingkah laku dan perbuatan telah diatur dalam setiap uu, kejahatan masih saja marak terjadi di negara ini. Salah satunya adalah kejahatan terhadap nyawa atau sering disebut dengan pembunuhan.

Pembunuhan merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang tidak manusiawi dan atau suatu perbuatan yang tidak berperikemanusiaan, karena pembunuhan merupakan suatu tindak pidana terhadap nyawa orang lain tanpa mempunyai rasa kemanusiaan. Pembunuhan juga merupakan suatu perbuatan jahat yang dapat mengganggu keseimbangan hidup, keamanan, ketentraman, dan ketertiban dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Oleh karena itu, pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang tercela, ataupun tidak patut.

Tindak pidana pembunuhan ini sebenarnya telah diatur sebelumnya pada ketentuan Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana), yang rumusannya, "Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun".

Terkadang, pelaku tindak pidana pembunuhan ini tidak hanya dilakukan oleh satu orang saja, tapi dapat pula dilakukan dengan ikut sertanya dua orang atau lebih dalam melaksanakan aksi pembunuhan tersebut, padahal, dengan merujuk pada ketentuan pasal-pasal dalam

KUHPidana seperti Pasal 338 mengenai Pembunuhan diatas, subjek hukum yang disebutkan dan dimaksudkan dalam rumusan tindak pidana adalah hanya satu orang, bukan beberapa orang.

Ketentuan penyertaan, yang dalam hal ini secara bersama-sama tersebut juga dituangkan dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHPidana yang rumusannya :

1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
 - 1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 - 2) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan semacam itumenyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Dengan latar belakang inilah penulis tertarik untuk membuat suatu karya ilmiah (skripsi) dengan judul : ***Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Secara Bersama-sama (Studi Kasus Putusan Nomor. 281/Pid.B/2012 /PN.Watampone)***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut :

5. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama ?

6. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama pada putusan No. 281/Pid.B/2012/PN.Watampone?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai pada Penulisan ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama!
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama dalam Putusan No. 281/Pid.B/2012/PN.Watampone!

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut :

1. Diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap perkembangan hukum di indonesia, khususnya mengenai tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama.
2. Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menambah bahan refrensi bagi mahasiswa fakultas hukum pada umumnya dan pada khususnya bagi Penulis sendiri dalam menambah pengetahuan tentang ilmu hukum.

3. Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pemerintah agar lebih memperhatikan penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam bahasa latin disebut dengan *delictum* yaitu delik, dalam bahasa Belanda tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*, yang terdiri dari tiga unsur kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh, sementara *feit* lebih diartikan sebagai tindak, peristiwa, dan perbuatan atau sebagian dari suatu kenyataan. Secara harfiah *strafbaarfeit* dapat diartikan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Dari pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dapat dihukum adalah kenyataan, perbuatan atau peristiwa, bukan pelaku.

Menurut Adami Chazawi (2008:67-68) menjelaskan bahwa :

Di Indonesia sendiri dikenal adanya tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari istilah *Strafbaarfeit*. Istilah yang pernah digunakan baik yang digunakan dalam perundang-undangan maupun dari literatur-literatur hukum diantaranya adalah tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum dan yang terakhir adalah perbuatan pidana.

Sulitnya memberikan pengertian terhadap *strafbaarfeit*, membuat para ahli mencoba untuk memberikan defenisi tersendiri dari sudut

pandang mereka yang menimbulkan banyaknya ketidakseragaman rumusan dan penggunaan istilah *strafbaarfeit*.

Hezewinkel Suringa (P.A.F. Lamintang, 1997:181) mendefinisikan *strafbaarfeit* sebagai berikut :

suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.

Sementara itu, Jonkers (Bambang Poernomo, 1982:91) memberikan definisi tentang *strafbaarfeit* menjadi 2 bagian, yaitu :

1. Definisi pendek memberikan pengertian *strafbaarfeit* sebagai kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.
2. Definisi panjang memberikan pengertian *strafbaarfeit* sebagai suatu kelakuan yang melawan hukum yang dilakukan baik dengan sengaja maupun lalai oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pengertian Jonkers tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai unsur-unsur dari suatu *strafbaarfeit*, yaitu ;

1. Perbuatan melawan hukum.
2. Dengan sengaja.
3. Dapat dipertanggungjawabkan.
4. Diancam pidana.

Selain Jonkers, Pompe (Bambang Poernomo, 1982:91) dalam memberikan definisi tentang *strafbaarfeit* juga membagi atas 2 pengertian, yaitu :

1. Defenisi menurut teori memberikan pengertian *strafbaarfeit* sebagai suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
2. Defenisi menurut hukum positif, merumuskan *strafbaarfeit* sebagai suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dilarang.

Defenisi secara teoritis tersebut memberikan pemahaman bahwa setiap perbuatan yang dilakukan yang melanggar norma ataupun hukum, wajib untuk dilakukan hukuman atau sanksi agar tatanan hukum dan kesejahteraan masyarakat tetap dapat terjaga. Menurut defenisi teori tersebut, agar seseorang dapat dihukum maka dalam perbuatan tersebut harus mengandung unsur melawan hukum dan unsur kesalahan (*schuld*) baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Sementara defenisi menurut hukum positif, perbuatan yang dapat dihukum tidak cukup jika hanya mengandung unsur melawan hukum dan unsur kesalahan, namun dalam perbuatan itu juga harus mengandung unsur pertanggungjawaban atau dengan kata lain, orang dapat dipidana jika orang yang melakukan tindak pidana mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab serta perbuatan tersebut dalam undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang harus dihukum.

Hal di atas sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Simons (P.A.F. Lamintang, 1997:185) bahwa *strafbaarfeit* adalah :

Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Alasan dari Simons(P.A.F. Lamintang, 1997:185), apa sebabnya *strafbaarfeit* itu harus dirumuskan seperti di atas adalah karena :

- a. Untuk adanya suatu *strafbaarfeit* itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat satu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, di mana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum;
- b. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang, dan
- c. Setiap *strafbaarfeit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu *onrechtmatige handeling*.

Lebih lanjut Simons (P.A.F. Lamintang, 1997:186) mengatakan, sifatnya yang melawan hukum seperti dimaksud di atas itu timbul dengan sendirinya dari kenyataan, bahwa tindakan tersebut adalah bertentangan dengan sesuatu peraturan dari undang-undang, hingga pada dasarnya sifat tersebut bukan merupakan suatu unsur dari delik yang mempunyai arti yang tersendiri seperti halnya dengan unsur-unsur yang lain.

Banyaknya istilah tentang *strafbaarfeit* Penulis lebih sepakat untuk memakai istilah tindak pidana, dengan alasan bahwa istilah tindak pidana bukan lagi menjadi istilah awam bagi masyarakat Indonesia.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Jika diteliti peraturan perundang-undangan pidana Indonesia seperti KUHPidana dan peraturan di bidang hukum pidana, tidak ditemukan pengertian tindak pidana. Di dalam uu hanya menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dan bahkan ada yang hanya menyebut kualifikasi tindak pidana. Secara umum tindak pidana dapat diartikan sebagai perbuatan yang tercela yang pembuatnya dapat dipidana.

Andi Zainal Abidin Farid (1995:220) mengemukakan bahwa:

Disebutkannya unsur-unsur tindak pidana dan unsur-unsur pembuat tindak pidana, membawa konsekuensi bahwa unsur-unsur itu harus dimuat di dalam dakwaan penuntut umum dan harus pula dibuktikan di depan sidang pengadilan negeri. Hal itu tidak berarti bahwa hanya unsur yang disebut secara *expressis verbis* (tegas) di dalam undang-undang itu saja yang merupakan unsur-unsur tindak pidana. Ada unsur-unsur tindak pidana yang sering tidak disebut dalam undang-undang, namun diakui sebagai unsur misalnya unsur melawan hukum yang materil dan yang tidak disebut dalam undang-undang biasa dinamakan unsur diam-diam yang tidak perlu dimuat dalam dakwaan penuntut umum dan tidak perlu dibuktikan.

Unsur diam-diam perlu diterima sebagai asumsi, bahwa pembuatnya dapat membuktikan ketiadaan unsur-unsur itu, misalnya seorang dukun menyunat di sebuah kampung yang tidak mempunyai puskesmas yang diadili karena menyunat orang tanpa izin praktik, dituntut karena menganiaya. Perbuatan dapat dibuktikan akan tetapi tidak melawan

hukum materiil, karena profesinya diakui oleh masyarakat dan oleh karena itu perbuatannya dirasakan tidak tercela.

Dalam hubungannya dengan unsur-unsur tindak pidana, Andi Zainal Abidin Farid (1995:221) berpendapat bahwa walaupun unsur-unsur tiap-tiap tindak pidana berbeda, namun pada umumnya mempunyai unsur-unsur yang sama, yaitu:

- a. Perbuatan aktif/positif atau pasif/negatif;
- b. Akibat (khusus tindak pidana-tindak pidana yang dirumuskan secara materiil);
- c. Melawan hukum formil yang berkaitan dengan asas legalitas dan melawan hukum materiil (unsur diam-diam) dan;
- d. Tidak adanya dasar pembenar.

Rusli Effendy, (1986:47) yang memakai istilah perbuatan pidana dalam menerjemahkan *strafbaarfeit*, merumuskan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, barangsiapa yang melanggar larangan tersebut dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan dilarang
2. Diancam pidana
3. Melanggar larangan.

Dengan demikian, unsur perbuatan harus dipisahkan dengan unsur pembuat untuk membuktikan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum.

Menurut Tongat, (2009:105), menjelaskan bahwa terjadinya tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun negatif (tidak berbuat).

Dengan *handeling* dimaksudkan tidak saja perbuatan akan tetapi melalaikan atau tidak berbuat, seseorang yang tidak berbuat atau melalaikan dapat dikatakan bertanggungjawab atas perbuatan pidana. Dalam hukum pidana, kewajiban hukum atau keharusan hukum bagi seseorang untuk berbuat dapat dirinci dalam tiga hal :

- a. Undang-undang (*de wet*).

Undang-undang mengharuskan seseorang untuk berbuat, maka undang-undang merupakan sumber kewajiban hukum.

- b. Dari jabatan.

Keharusan yang melekat pada jabatan.

- c. Dari perjanjian.

Keharusan dalam melaksanakan perjanjian.

- 2) Diancam pidana.
- 3) Melawan hukum.
- 4) Dilakukan dengan kesalahan.
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.
- 6) Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan.

Andi Zainal Abidin Farid (1995: 171-179) menjelaskan bahwa

Unsur delik menurut pandangan monoisme dan pandangan dualisme sebagai berikut:

Unsur delik menurut aliran monoisme hanya mengenal unsur perbuatan dan pembuat sedangkan unsur delik menurut aliran dualisme yaitu:

- a. Perbuatan aktif serta akibat (khusus untuk delik materil);
- b. Yang melawan hukum yang objektif dan subjektif;
- c. Hal ikhwal yang menyertai perbuatan pidana
- d. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana; dan
- e. Tak adanya alasan pembenar.

Adami Chazawi (2008:82) dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu KUHPidana, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu;

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

B. Tindak Pidana Pembunuhan

1. Pengertian Tindak pidana Pembunuhan

Para ahli hukum tidak memberi pengertian atau definisi tentang apa yang dimaksud dengan pembunuhan, akan tetapi banyak menggolongkan pembunuhan itu kejahatan terhadap nyawa (jiwa) orang lain.

Sebelum membicarakan pengertian tindak pidana pembunuhan menurut KUHPidana, maka sebaiknya di ketengahkan lebih dahulu pengertian pembunuhan dari segi bahasa.

Poerwadarminta (1985 :169) mengemukakan bahwa :

Pembunuhan berasal dari kata bunuh yang mendapat awalan pe dan akhiran an yang berarti mematikan, menghilangkan (mencoret) tulisan memadamkan api.

Sedangkan dari segi hukumnya, hal ini dapat dilihat dalam rumusan Pasal 388 KUHPidana yang mengatur tentang pembunuhan biasa yang merupakan bentuk pokok dari kejahatan terhadap jiwa seseorang. Sehubungan dengan hal ini dalam KUHPidana terjemahan R Soesilo (1994: 240) menjelaskan bahwa “barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun”.

Dari kedua rumusan tersebut di atas, maka tampak ada perbedaan antara pengertian pembunuhan dari segi bahasa dengan pengertian pembunuhan dari segi yuridis, pengertian pembunuhan dari segi bahasa yang menjadi obyek pembunuhan itu bukan hanya manusia, melainkan semua yang bernyawa, termasuk zat lain seperti menghilangkan tulisan, memadamkan api, sedangkan dari segi yuridis obyek dari pembunuhan itu sendiri adalah manusia.

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Pembunuhan

Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dikualifikasikan berikut:

- 1) Pembunuhan biasa dalam bentuk pokok, Pasal 338 KUHPidana)

- 2) Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului dengan tindak pidana lain (Pasal 339 KUHPidana)
- 3) Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHPidana)
- 4) Pembunuhan ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak setelah dilahirkan (Pasal 341, 342, dan 343 KUHPidana)
- 5) Pembunuhan atas permintaan korban (Pasal 344 KUHPidana)
- 6) Pengancuran dan pertolongan pada bunuh diri (Pasal 345 KUHPidana)
- 7) Pengguguran dan pembunuhan terhadap kandungan (Pasal 346-349 KUHPidana).

a. Pembunuhan Biasa dalam Bentuk Pokok

Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dalam bentuk pokok, dimuat dalam Pasal 338 KUHPidana, apabila rumusan pasal tersebut dirinci unsur-unsurnya, maka terdiri dari:

- a) Unsur obyektif:
 - 1) Perbuatan: menghilangkan nyawa;
 - 2) Obyeknya: nyawa orang lain;
- b) Unsur subyektif: dengan sengaja.

Adami Chazawi, (2001:44) Dalam pembunuhan terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Adanya wujud perbuatan

- 2) Adanya suatu kematian
- 3) Adanya hubungan sebab dan akibat (causal verband) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain)

Dijelaskan lebih lanjut oleh Adami Chazawi, (2001:44) bahwa :

Antara unsur subyektif sengaja dengan wujud perbuatan menghilangkan terdapat syarat yang harus dibuktikan, ialah pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) harus tidak lama setelah timbulnya kehendak (niat) untuk menghilangkan nyawa orang lain itu. Oleh karena apabila terdapat tenggang waktu yang cukup lama sejak timbulnya atau terbentuknya kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya, di mana dalam tenggang waktu yang cukup lama itu si pelaku dapat memikirkan tentang berbagai hal, misalnya memikirkan apakah kehendaknya itu akan terwujud dalam pelaksanaan ataukah tidak, dengan cara apa kehendak itu akan diwujudkan dan sebagainya, maka pembunuhan itu telah masuk dalam pembunuhan berencana (340), dan bukan lagi pembunuhan biasa.

Adami Chazawi, (2001:44) menambahkan bahwa :

Rumusan Pasal 338 KUHPidana dengan menyebutkan unsur tingkah laku sebagai "menghilangkan nyawa" orang lain, menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan adalah suatu tindak pidana materil. Tindak pidana materil adalah suatu tindak pidana yang melarang menimbulkan akibat tertentu (akibat yang dilarang atau akibat konstitutif/constitutief gevolg). Untuk dapat terjadi atau timbulnya tindak pidana materil secara sempurna, tidak semata-mata digantungkan pada selesainya perbuatan, melainkan apakah dari wujud perbuatan itu telah menimbulkan akibat yang terlarang ataukah belum / tidak.

b.Kejahatan yang Diikuti, Disertai atau Didahului Tindak Pidana Lain

Pembunuhan yang dimaksud ini adalah sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 339 KUHPidana, yang rumusannya:

Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana lain, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan

atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk menghindarkan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum, dipidana dengan penjara seumur hidup atau sementara waktu, paling lama 20 tahun.

Adami Chazawi, (2001:47) mengemukakan bahwa apabila rumusan tersebut dirinci, maka terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut

- a. Semua unsur pembunuhan (obyektif dan subyektif) pasal 338 KUHPidana;
- b. Yang (1) diikuti, (2) disertai atau (3) didahului oleh tindak pidana lain;
- c. Pembunuhan itu dilakukan dengan maksud:
 - 1) untuk mempersiapkan tindak pidana lain;
 - 2) untuk mempermudah pelaksanaan tindak pidana lain;
 - 3) dalam hal tertangkap tangan ditujukan:
 - a) untuk menghindarkan (1) diri sendiri maupun (2) peserta lainnya dari pidana, atau
 - b) untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum (dari tindak pidana lain itu).

Kejahatan Pasal 339 KUHPidana, kejahatan pokoknya adalah pembunuhan, suatu bentuk khusus pembunuhan yang diperberat. Pada semua unsur yang disebutkan butir b dan c itulah yang diletakkan sifat yang memberatkan pidana dalam jenis pembunuhan khusus ini.

Chairul Huda (2006:71), menjelaskan bahwa :

Dalam pembunuhan yang diperberat ini sebetulnya terjadi 2 macam tindak pidana sekaligus, ialah yang satu pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (338) dan yang lain adalah tindak pidana lain (selain pembunuhan). Tindak pidana lain itu harus terjadi, tidak boleh baru percobaannya, apabila pembunuhannya telah terjadi, akan tetapi

tindak pidana lain itu belum terjadi, misalnya membunuh untuk mempersiapkan pencurian dimana pencurian itu belum terjadi, maka kejahatan 339 tidak terjadi. Adanya unsur diikuti, disertai atau didahului oleh tindak pidana lain, artinya tindak pidana itu harus sudah terjadi. Apabila tindak pidana lain itu baru merupakan percobaannya, sedangkan pembunuhannya telah terjadi, maka yang terjadi adalah percobaan kejahatan lain pada pembunuhan pasal 339 KUHPidana.

c. Pembunuhan Berencana.

Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan dalam arti Pasal 338 KUHPidana ditambah dengan adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu. Lebih berat ancaman pidana pada pembunuhan berencana, jika dibandingkan dengan pembunuhan dalam Pasal 338 KUHPidana maupun Pasal 339 KUHPidana, diletakkan pada adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu itu, Pasal 340 KUHPidana ini rumusannya “Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena makar mati, dengan hukuman penjara selamanya 15 tahun”.

Adami Chazawi, (2001:52) menjelaskan bahwa:

Pasal 340 KUHPidana dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh unsur dalam pasal 338 KUHPidana, kemudian ditambah dengan satu unsur lagi yakni “dengan rencana terlebih dahulu”. Oleh karena dalam pasal 340 KUHPidana mengulang lagi seluruh unsur 338, maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang terdiri sendiri lepas dan lain dengan pembunuhan biasa dalam bentuk pokok. (Pasal 338 KUHPidana).

Lain halnya dengan pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului tindak pidana lain (Pasal 339 KUHPidana), dimana unsur-unsur dalam pasal 338 KUHPidana tidak lagi disebutkan dalam rumusan Pasal 339 KUHPidana, cukup disebutkan dengan pembunuhan saja, yang artinya menunjuk pada pengertian Pasal 338 KUHPidana. Oleh sebab itu tidak

dipersoalkan lagi, bahwa pembunuhan Pasal 339 KUHPidana adalah berupa pembunuhan dalam bentuk khusus yang diperberat (*gequalificeerdemisdrijf*).

Wahyu Adnan (2007:41) menambahkan bahwa :

Apabila pembunuhan berencana itu dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, seharusnya tidak dirumuskan secara demikian, melainkan dalam Pasal 340 KUHPidana itu cukup disebut sebagai pembunuhan saja, tidak perlu menyebut ulang seluruh unsur Pasal 338 KUHPidana, dan rumusannya dapat berupa "pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana karena pembunuhan dengan rencana" dan seterusnya.

Berdasarkan yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa merumuskan Pasal 340 KUHPidana dengan cara demikian, pembentuk undang-undang sengaja melakukannya dengan maksud sebagai kejahatan yang berdiri sendiri.

d. Pembunuhan Oleh Ibu Terhadap Bayinya Pada Saat Atau Tidak Lama Setelah Melahirkan.

Bentuk pembunuhan yang dilakukan oleh ibu terhadap bayinya pada saat dan tidak lama setelah dilahirkan, yang dalam praktik hukum sering disebut dengan pembunuhan bayi, ada 2 macam, masing-masing dirumuskan dalam Pasal 341 KUHPidana dan 342 KUHPidana. Pasal 341 KUHPidana, adalah pembunuhan bayi yang dilakukan tidak dengan berencana (pembunuhan bayi biasa atau *kinderdoodslag*), sedangkan

Pasal 342 KUHPidana pembunuhan bayi yang dilakukan dengan rencana lebih dulu (kindermoord)

a) Pembunuhan Biasa Oleh Ibu Terhadap Bayinya Pada Saat Atau Tidak Lama Setelah Dilahirkan

Pembunuhan biasa oleh ibu terhadap bayinya sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 341 KUHPidana, rumusannya adalah sebagai berikut:

Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan bayi pada saat bayi dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya dipidana karena membunuh bayinya sendiri dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.

Petindaknya haruslah seorang ibu, yang artinya ibu dari bayi (korban) yang dilahirkan. Jadi dalam hal ini ada hubungan antara ibu dan anak. Adanya ibu yang merupakan syarat yang melekat pada subyek hukumnya, memandakan bahwa kejahatan ini tidak dapat dilakukan oleh setiap orang.

b) Pembunuhan Ibu Terhadap Bayinya Pada Saat Atau Tidak Lama setelah Dilahirkan Direncanakan Lebih Dulu

Pembunuhan bayi berencana yang dimaksudkan di atas, adalah pembunuhan bayi sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 342 KUHPidana, yakni:

Seorang ibu yang untuk melaksanakan keputusan kehendak yang telah diambilnya karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan bayi, pada saat bayi dilahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja menghilangkan nyawa bayinya itu, dipidana karena pembunuhan bayinya sendiri dengan rencana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

Kejahatan pembunuhan oleh ibu terhadap bayinya dengan rencana pembunuhan bayi biasa (341) ditambah satu unsur lagi yakni dengan rencana terlebih dahulu. Karena adanya unsur rencana inilah maka pembunuhan ini diberi kualifikasi sebagai pembunuhan berencana.

e. Pembunuhan Atas Permintaan Korban

Bentuk pembunuhan ini diatur dalam Pasal 344 KUHPidana, yang rumusannya sebagai berikut :

Barang siapa yang menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.

Wahyu Adnan (2007:56) menjelaskan bahwa :

Perbedaan yang nyata antara pembunuhan 344 dengan pembunuhan 338, adalah terletak pada pembunuhan 344 terdapat unsur (1) atas permintaan korban sendiri, (2) yang jelas dinyatakan dengan sungguh-sungguh, dan (3) tidak dicantumkan unsur kesengajaan sebagaimana dalam rumusan Pasal 338 KUHPidana. faktor penyebab lebih ringan jika dibandingkan dengan pidana yang diancamkan pada pembunuhan 338 adalah diletakkan pada unsur bahwa pembunuhan (334) itu dilakukan atas permintaan korban itu sendiri. Tampaknya, walaupun tidak diakui secara penuh akan hak seseorang atas nyawanya, namun hak untuk menentukan atas

nyawa si pemilik sendiri ini sedikit masih dihargai. Dengan mengurangi pidana atas pembunuhan atas permintaan korban, jika dibandingkan dengan pembunuhan biasa (338), ini dapat diartikan bahwa uu memberi penghargaan atas hak penentuan bagi si pemilik atas nyawanya sendiri.

f. Penganjuran dan Pertolongan Pada Bunuh Diri

Kejahatan yang dimaksud adalah dicantumkan dalam Pasal 345

KUHPidana yang rumusannya adalah :

Barangsiapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun kalau orang itu jadi bunuh diri.

Dalam perbuatan mendorong inisiatif untuk melakukan bunuh diri itu bukan berasal dari orang yang bunuh diri, melainkan dari orang lain, yakni dari orang-orang yang mendorong. Berbeda dengan perbuatan menolong dan memberikan sarana, karena dalam kedua perbuatan ini, inisiatif untuk bunuh diri berasal dari korban itu sendiri. Pada kedua perbuatan ini tidak terdapat pengaruh (batin) apapun pada pembentukan kehendak bagi korban untuk bunuh diri itu.

g. Pengguguran dan Pembunuhan Kandungan

Kejahatan pengguguran dan pembunuhan terhadap kandungan diatur dalam 4 pasal yakni : 346, 347, 348, dan 349 KUHPidana.

Obyek kejahatan ini adalah kandungan, yang dapat berupa sudah berbentuk makhluk yakni manusia, berkaki dan bertangan dan berkepala dan dapat juga belum berbentuk manusia.

a) Pengguguran dan Pembunuhan Kandungan Olehnya Sendiri

Pengguguran dan pembunuhan kandungan oleh perempuan yang mengandung itu sendiri, dicantumkan dalam pasal 346

KUHPidana yang rumusannya adalah :

Seorang perempuan yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Wahyu Adnan (2007:69), menjelaskan secara rinci bahwa :

dalam rumusan kejahatan dalam Pasal 346 KUHPidana, subyek hukumnya disebutkan dengan "seorang perempuan", sedangkan Pasal 341 dan 342 adalah seorang ibu. Hal ini dapat dimengerti, karena dalam pasal 346 KUHPidana tidak diisyaratkan kandungan tersebut sudah berwujud sebagai bayi sempurna dan belum ada proses kelahiran bayi maupun kelahiran bayi sebagaimana pada Pasal 341 dan 342 KUHPidana.

Ada 4 perbuatan yang dilarang dalam pasal 346, yakni : menggugurkan kandungan, mematikan kandungan dan menyuruh orang lain menggugurkan kandungan dan menyuruh orang lain mematikan kandungan.

b) Pengguguran dan Pembunuhan Kandungan Tanpa Persetujuan

Perempuan yang mengandung

Kejahatan ini dicantumkan dalam Pasal 347 KUHPidana yang rumusannya adalah:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seseorang perempuan tanpa persetujuannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.
 - (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.
- c) Pengguguran dan Pembunuhan Kandungan Atas Persetujuan Perempuan yang mengandung

Kejahatan ini dirumuskan dalam pasal 348 KUHPidana, yang rumusannya sebagai berikut:

- (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan dengan persetujuannya, dipidana dengan pidana penjara selamalamanya 5 tahun 6 bulan.
 - (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya perempuan tersebut dipidan penjara paling lama 7 tahun.
- d) Pengguguran Atau Pembunuhan Kandungan Oleh Dokter, Bidan Atau juru Obat

Dokter, bidan dan juru obat adalah kualitas pribadi yang melekat pada subyek hukum (petindak) dari kejahatan sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 349 KUHPidana.

Sedangkan pembunuhan yang dilakukan dengan tidak sengaja adalah kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 359 KUHPidana, yang rumusannya:

Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun.

3. Unsur unsur Tindak pidana Pembunuhan

Di dalam Pasal 338 KUHPidana (Soesilo,1995:240) yang rumusannya sebagai berikut barangsiapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Pasal 338 KUHPidana tersebut di atas mengandung unsur sebagai berikut :

a. Dengan sengaja

Pengertian tentang sengaja tidak terdapat di dalam KUHPidana, jadi harus dicari di dalam buku-buku karangan para ahli Hukum Pidana. Mengetahui unsur sengaja dalam tindak pidana pembunuhan sangat penting karena bisa saja terjadi kematian orang lain, sedangkan kematiannya itu sama sekali tidak disengaja atau tidak dikehendaki oleh si pelaku.

Zainal Abidin Farid (1995:262) menjelaskan bahwa secara umum para sarjana hukum telah menerima tiga bentuk sengaja, yakni :

- (1) Sengaja sebagai niat .
- (2) Sengaja insaf akan kepastian
- (3) Sengaja insaf akan kemungkinan.

Kemudian tiga bentuk sengaja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut

1) Sengaja Sebagai Niat

Menurut Zainal Abidin Farid ,(1995:266) bahwa dalam KUHPidana (*Crimineel Wetboek Nederland*) tahun 1809, dicantumkan sengaja (*opzet*) itu adalah maksud untuk membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan oleh UU.

Satochid Kartanegara (Marpaung,1991:11) mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan *opzet willens en wetens* (dikehendaki dan diketahui) adalah :

Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus mengerti (*wetens*) akan akibat dan perbuatan itu.

Menurut VOS (Marpaung,1991:14) mengemukakan sengaja sebagai niat (*opzet als oogmerk*) adalah :

Menghendaki akibat perbuatannya, seandainya si pelaku (*dader*) telah mengetahui bahwa akibat perbuatannya itu tidak terjadi maka ia akan melakukan perbuatannya.

Sebaliknya Jonkers (Effendy,1986:85) mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Sengaja itu tidak usah mengetahui secara mutlak, tetapi sudah cukup jika memahami, lagi pula sengaja itu tidak berwarna, artinya sudah cukup jika si pelaku dengan sengaja melakukan atau mengabaikan apa yang diperintahkan oleh undang-undang yang diancam oleh pidana tidak perlulah mengetahui bahwa tindak pidana itu tercantum dalam undang-undang.

Memperhatikan teori tersebut di atas, nampak adanya perbedaan pendapat dari beberapa sarjana tetapi perbedaan

tersebut hanya merupakan pemakaian kata yang membawa hasil yang sama.

2) Sengaja insaf akan kepastian (*opzet bijzekerhoidsbe wustzijn*)

Si pelaku pasti mengetahui atau yakin benar bahwa akibat yang di maksud akan terjadi suatu akibat lain. Dengan kata lain si pelaku (dader) menyadari/ menginsafi bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan menimbulkan akibat lain.

Prodjodikoro (2003:63) berpendapat tentang sengaja insaf akan kepastian, sebagai berikut :

Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya itu tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang akan menjadi dasar dari tindak pidana, kecuali ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

3) Sengaja insaf akan kemungkinan

Sengaja ini juga disebut sengaja dalam sadar akan kemungkinan bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan yang akan berakibat tertentu, akan tetapi si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain, yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang.

Bemmelen (Marpaung, 1991:17) mengutarakan pendapatnya mengenai sengaja insaf akan kemungkinan sebagai berikut :

Yang dinamakan sengaja bersyarat bertolak dari kemungkinan, maka juga tidak pernah lebih banyak dikehendaki dan diketahui daripada kemungkinan itu. Seseorang yang menghendaki

kemungkinan matinya orang lain, tidak dapat dikatakan bahwa ia menghendaki supaya orang itu mati. Tetapi jika seseorang melakukan tindakan \ dengan kesadaran bahwa perbuatannya akan dapat menyebabkan matinya orang lain,, ia memang menunjukkan bahwa ia menghendaki kematian orang itu. •

Lamintang (Marpaung, 1991: 18) mengemukakan iuu-ngeiia i dolus eventualis sebagai berikut :

Pelaku yang bersangkutan pada waktu ia melakukan perbuatan itu untuk menimbulkan suatu akibat; yang dilarang oleh Undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbulnya suatu akibat yang lain dari pada akibat yang memang ia kehendaki.

Berdasarkan dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur kesengajaan meliputi tindakannya dan obyeknya artinya pelaku mengetahui dan menghendaki hilangnya nyawa seseorang dari perbuatannya tersebut. Selanjutnya untuk mengetahui terpenuhinya tindak pidana pembunuhan dengan unsur sengaja yang terkandung dalam Pasal 338 KUHPidana disyaratkan bahwa pembunuhan tersebut harus dilakukan sesegera mungkin sesudah timbulnya maksud atau niat. Untuk membunuh dalam Pasal 338 KUHPidana ini tidak dengan suatu perencanaan, sehingga niat disini adalah datangnya seketika itu juga.

b. Menghilangkan Nyawa Orang Lain

Unsur kedua dari Pasal 338 KUHPidana adalah menghilangkan nyawa orang lain yang merupakan unsur obyektif. Dalam rumusan tindak pidana pembunuhan Pasal 338 KUHPidana ini tidak ditentukan

bagaimana cara melakukan perbuatan pembunuhan tersebut, tidak ditentukan alat apa yang digunakan tetapi hanya menggariskan bahwa akibat dari perbuatan si pelaku mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

Menurut Wahyu Adnan (2007:45), menjelaskan bahwa :

untuk memenuhi unsur hilangnya nyawa orang lain harus ada suatu perbuatan walaupun perbuatan tersebut kecil yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Akibat dari perbuatan tersebut tidak perlu terjadi sesegera mungkin akan tetapi dapat timbul kemudian.

C. Tinjauan Umum Terhadap Penyertaan

1. Pengertian Penyertaan

Apabila kita membaca rumusan tiap pasal pada ketentuan hukum pidana, maka orang akan berkesimpulan bahwa dalam tiap tindak pidana hanya seorang pelaku yang akan dikenai hukuman pidana atas pelanggaran tindak pidana yang telah di perbuatnya. Apabila dilihat dalam perakteknya sering terjadi suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang dengan kata lain dilakukan lebih dari seorang dimana disamping pelaku itu sendiri terdapat pula seorang atau beberapa orang lain yang turut serta dalam peristiwa pidana tersebut.

Kata “Penyertaan” atau *deelneming* berasal dari kata *deelnemen* (Belanda) yang diterjemahkan dengan kata “menyertai” dan *deelneming* diartikan menjadi penyertaan”.

Deelneming dipermasalahkan dalam hukum pidana karena berdasarkan kenyataan sering suatu tindak pidana dilakukan bersama oleh beberapa orang. Jika hanya satu orang yang melakukan suatu tindak pidana, pelakunya disebut *alleen dader*.

Satochid Kartanegara (Leden Marpaung, 2005 : 77) mengartikan *deelneming* apabila dalam satu tindak pidana tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang.

Menurut Leden Marpaung (2005:77) pendapat Satochid Kartanegara di atas kurang tepat, karena walaupun tersangkut beberapa orang, jika hanya satu orang yang dapat dipertanggungjawabkan, perbuatan tersebut tidak termasuk *deelneming*. Lebih tepat jika *deelneming* diartikan suatu tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini terkait dengan pertanggung jawaban.

Dalam rumusan perundang-undangan sendiri terlihat pada pasal 55 KUHPidana dan Pasal 56 KUHPidana yang rumusannya:

1. Sebagai pelaku tindak pidana akan dihukum:
 - a) Mereka melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;
 - b) Mereka yang dengan pemberian, kesanggupan, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, dengan paksaan, ancaman, atau penipuan, atau dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan dengan sengaja membujuk perbuatan itu.

Tentang orang-orang tersebut belakangan (sub ke- 2) hanya perbuatan-perbuatan yang oleh mereka dengan sengaja dilakukan, serta akibat-akibatnya dapat diperhatikan.

Selanjutnya pada Pasal 56 KUHPidana dijelaskan bahwa :

“ Sebagai pembantu melakukan kejahatan akan dihukum:

- a) Mereka yang sengaja membantu pada waktu kejahatan dilakukan.
- b) Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Menurut doktrin Leden Marpaung (2005 : 77), *deelneming* menurut sifatnya terdiri atas :

- a. *deelneming* yang berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari tiap peserta dihargai sendiri-sendiri ;
- b. *deelneming* yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta yang lain.

Berdasarkan rumusan masalah Pasal 55 KUHPidana dan Pasal 56

KUHPidana tersebut, terdapat 5 peranan pelaku, yakni :

- 1) orang yang melakukan (*dader or doer*);
- 2) orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*);
- 3) orang yang turut melakukan (*mededader*);
- 4) orang yang sengaja membujuk (*uitlokker*);
- 5) orang yang membantu melakukan (*medepllichtige*).

2. Bentuk-bentuk Penyertaan

Dengan adanya kedua pasal tersebut maka diadakan pembagian golongan peserta terhadap tindak pidana penyertaan ini, yaitu:

1. Melakukan Perbuatan (*Dader*)

Dalam kamus bahasa Belanda, kata *dader* berarti pembuat, akan tetapi dalam kamus bahasa Indonesia tidak tercantum kata pembuat melainkan pelaku yang artinya antara lain (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2000:425)

- 1) Orang yang melakukan suatu perbuatan
- 2) Pemeran, pemain (sandiwara dan sebagainya)
- 3) Yang melakukan suatu perbuatan.

Menurut Lilik Mulyadi (2000:78) yang dimaksud dengan pelaku adalah:

“Pelaku adalah orang-orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang, baik unsur subjektif maupun unsur objektif”.

2. Menyuruh Melakukan Perbuatan (*Doen Plegen*, *Middelijke dader*)

Wujud penyertaan (*deelneming*) yang pertama-tama disebutkan oleh Pasal 55 KUHPidana adalah menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen*).

Menurut Wirjono Projodikoro (2003:118), ini terjadi apabila seorang lain menyuruh si pelaku melakukan perbuatan yang biasanya merupakan tindak pidana, tetapi oleh karena beberapa hal si pelaku itu tidak dikenai hukuman pidana. Jadi si pelaku seolah-olah cuma menjadi alat belaka yang dikendalikan oleh si penyuruh. Pelaku

semacam ini dalam ilmu pengetahuan hukum dinamakan *manus ministra* (tangan yang dikuasai), dan si penyuruh dinamakan *manus domina* (tangan yang menguasai).

3. Turut Melakukan Perbuatan (*Medeplegan, Mededader*)

R. Soesilo (1995:73) berpendapat bahwa:

“Dalam hal turut melakukan sedikit-dikitnya harus terdapat dua orang yaitu orang yang melakukan (*pelger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang tersebut haruslah melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi mereka melakukan anasiratau elemen dari peristiwa itu. Tidaklah boleh misalhnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong saja, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu menurut R. Soesilo tidak masuk *medepleger* akan tetapi di hukum sebagai membantu melakukan (*medeplichtige*)”.

Dari berbagai pendapat oleh para ahli hukum dapat di pahami bahwa *medeplegen* adalah orang yang secara sadar bersama-sama melakukan sebuah pelanggaran pidana, dimana mereka bertanggung jawab atas perbuatan bersama, sekedar perbuatan itu terletak dalam lingkungan sengaja bersama-sama.

4. Membujuk Supaya Perbuatan Dilakukan (*Uitlokken, Uitlokker*)

Membujuk supaya perbuatan dilakukan (*uitlokken*) Bismar Siregar (1983 : 71) memberikan pendapat, yaitu:

Dalam hal ini ada (2) dua orang, yaitu yang membujuk, yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana dan

orang yang dibujuk atau orang yang digerakkan untuk melakukan tindak pidana dan kedua-duanya dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam hal *Uitlokken / uitlokke* diatur dalam Pasal 55 ayat(1) sub.

2 yang rumusannya sebagai berikut :

Mereka dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau derajat (martabat) dengan paksaan, ancaman atau tipu atau dengan memberikan kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja membujuk supaya perbuatan itu dilakukan.

Berdasarkan rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana, dapat diketahui unsur-unsur *uitlokking* (membujuk) sebagai berikut:

- a. Kesengajaan sipembujuk ditujukan pada dilakukannya delik tertentu oleh yang dibujuk.
- b. Membujuk orang itu dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana.
- c. Orang yang dibujuk itu sungguh-sungguh telah terbujuk untuk melakukan delik tertentu.
- d. Orang yang dibujuk, benar-benar telah melakukan delik, setidaknya melakukan percobaan.

Apabila diperhatikan akan terlihat bahwa syarat-syarat sebagai *uitlokking* tidak jauh berbeda dengan syarat sebagai *medeplichtigheid*.

Akan tetapi terdapat perbedaan secara mendasar dari kedua *deelneming* tersebut yaitu dikatakan sebagai pembujuk apabila inisiatif kearah tindak pidana datang dari si pembujuk sedangkan ia adalah seorang pembantu apabila inisiatif itu datang dari si pelaku utama.

5. Membantu (*Medeplichtigheid*)

Dalam memahami Pasal 56 KUHPidana, perlu diperhatikan lebih dahulu rumusan Pasal 57 ayat (4) KUHPidana sebagai berikut :

“Untuk menentukan hukuman bagi pembantu, hanya diperhatikan perbuatan yang dengan sengaja memudahkan atau diperlancar oleh pembantu serta akibatnya.”

Yang dimaksud rumusan “dengan sengaja memudahkan” adalah perbuatan yang memudahkan si pelaku untuk melakukan kejahatan tersebut, yang dapat terdiri atas berbagai bentuk atau jenis, baik materiil atau immaterial. Dalam hal ini, perlu diperhatikan pendapat Mr. M.H. Tirtaamidjaja (Leden Marpaung , 2005 : 83), yang menyatakan :

“suatu bantuan yang tidak berarti tidak dapat dipandang sebagai bantuan yang dapat dihukum”.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dimuat arti kata “membantu”, yaitu :

1. tolong,
2. penolong,

Dengan demikian, perbuatan membantu tersebut sifatnya menolong atau memberi sokongan. Dalam hal ini, tidak boleh merupakan perbuatan pelaksanaan. Jika telah melakukan perbuatan pelaksanaan, pelaku telah termasuk *mededader* bukan lagi membantu.

Mengenai rumusan “sengaja”, dalam hal ini telah cukup jika yang bersangkutan mengetahui bahwa apa yang dilakukannya itu akan memudahkan pelaksanaan kejahatan itu atau apa yang dilakukannya berhubungan dengan kejahatan yang akan dilakukan.

Simons (Leden Marpaung, 2005 : 83) menyatakan bahwa “membantu” harus memenuhi dua unsur, yakni unsur objektif dan subjektif. Hal tersebut diutarakan sebagai berikut.

“Perbuatan seseorang yang membantu itu dapat disebut telah memenuhi unsur yang bersifat objektif apabila perbuatan yang telah dilakukannya tersebut memang telah ia dimaksudkan untuk mempermudah atau untuk mendukung dilakukannya suatu kejahatan. Dalam hal seorang yang membantu telah menyerahkan alat-alat untuk melakukan kejahatan kepada seorang pelaku, namun ternyata alat-alat tersebut tidak digunakan oleh si pelaku, yang membantu tersebut juga tidak dapat dihukum.

Perbuatan seseorang yang membantu dapat disebut memenuhi unsur yang bersifat subjektif apabila si pembantu memang mengetahui bahwa perbuatannya itu dapat mempermudah atau dapat mendukung dilakukannya suatu kejahatan”.

Semua yang telah dibicarakan di atas adalah “membantu” suatu kejahatan dengan perbuatan yang bersifat aktif. Adakalanya perbuatan “membantu” dilakukan tanpa berbuat atau bersifat pasif. Hal ini dapat terjadi jika seseorang berkewajiban untuk berbuat “tetapi tidak berbuat”, misalnya petugas ronda sengaja tidak melakukan ronda agar maling dapat masuk ke rumah A; atau penjaga gudang walaupun barang di gudang diambil orang, ia diam saja tanpa berusaha melarang atau mencegah.

Adapun perbuatan “membantu” yang dianggap oleh KUHPidana sebagai perbuatan atau tindak pidana yang berdiri sendiri, antara lain seperti yang dimuat dalam Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 110, Pasal 236, dan Pasal 237 KUHPidana.

Pertanggungjawaban dari “membantu” diatur dalam Pasal 57 KUHPidana yang rumusannya :

- (1) Maksimum hukuman pokok yang diancamkan atas kejahatan, dikurangi sepertiga bagi si pembantu.
- (2) Jika kejahatan itu dapat dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, maka dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun.
- (3) Hukuman tambahan untuk kejahatan dan membantu melakukan kejahatan itu, sama saja.
- (4) Untuk menentukan hukuman bagi pembantu hanya diperhatikan perbuatan yang dengan sengaja memudahkan atau diperlancar oleh pembantu itu serta akibatnya.

D. Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana

Untuk Memberikan penjelasan tentang arti “pidana” dan “hukum pidana” menurut pakar yakni:

Menurut Moeljatno (Waluyo:2008:3), mengartikan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan dasar–dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sampai yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larang-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancam.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu

dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka atau telah melanggar larangan-larangan tersebut.

Menurut Sudarto (Waluyo:2008:3), mendefinisikan bahwa:

yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

2. Jenis-jenis Pidana

Mengenai teori pemidanaan dalam literatur hukum tersebut dengan teori hukum pidana/ *strafrecht-theorian* berhubungan langsung dengan pengertian hukum pidana subjektif. Teori-teori ini mencari dan menerangkan tentang dasar hak negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut.

Dalam Pasal 10 KUHPidana terdiri atas :

a. Pidana Pokok

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda

b. Pidana tambahan

1. Pidana pencabutan hak-hak tertentu
2. Pidana perampasan barang-barang tertentu
3. Pidana pengumuman keputusan hakim

Teori Pemidanaan dapat dikelompokkan dalam tiga golongan yaitu :

1. Teori absolute atau teori pembalasan
2. Teori relative atau teori tujuan
3. Teori gabungan

a. Teori absolute

Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Inilah dasar Pembelar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat, penjatuhan pidana yang ada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan terhadap orang lain.

Tindakan pembalasan didalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah yaitu :

1. Dijatuhkan pada penjahatnya (sudut subyektif dari pembalasan).
2. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut obyektif dari pembalasan).

Menurut Emmanuel kant (Adami Chazawi:2008:159), menyatakan bahwa menurut rasio, tiap kejahatan itu haruslah di ikuti oleh suatu pidana.

Menurut Hegel (Adami Chazawi:2008:160), dikenal dengan teori dialektikannya dalam segala yang ada didunia ini, bahwa:

Hukum atau keadilan merupakan suatu kenyataan, jika seseorang melakukan kejahatan atau penyerangan terhadap keadilan, berarti ia

mengingkari kenyataan adanya hukum. Oleh karena itulah, harus diikuti oleh suatu pidana berupa ketidakadilan terhadap pelakunya untuk mengembalikan menjadi suatu keadilan atau kembalinya tegaknya hukum.

Menurut Herbart (Adami Chazawi:2008:160) menjelaskan bahwa:

Berpokok pangkal pada pikiran bahwa apabila kejahatan tidak dibalas, maka akan menimbulkan rasa ketidakpuasan pada masyarakat. Agar kepuasan masyarakat dapat dicapai atau dipulihkan, maka dari sudut estetikanya harus dibalas dengan penjatuhan pidana yang setimpal pada penjahat pelakunya. Setimpal artinya pidana harus dirasakan sebagai penderitaan yang sama berat atau besarnya dengan penderitaan korban/ masyarakat yang diakibatkan oleh kejahatan itu.

b. Teori relative atau teori tujuan

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib hukum dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana.

Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat itu tadi, pidana merupakan suatu yang terpaksa perlu diadakan. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat yaitu:

1. Bersifat menakut-nakuti.
2. Bersifat memperbaiki.
3. Bersifat membinasakan.

Sementara itu, sifat pencegahannya dari teori ini ada dua macam yaitu :

1. Pencegahan umum.
2. Pencegahan khusus.

Menurut Beccaria (Adami Chazawi:2008:163) menjelaskan bahwa:

hukum pidana harus diatur dalam suatu kondifikasi yang disusun secara rasional dan sistematis agar semua orang mengetahui secara jelas dan pasti tentang perbuatan- perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

Menurut Feuerbach (Adami Chazawi:2008:163) :

Menyatakan bahwa sifat menakut-nakuti dari pidana itu, bukan pada penjatuhan pidana Inkonkrito, tetapi pengancaman pidana yang ditentukan dalam Undang-undang.

Menurut Van Hamel (Adami Chazawi:2008:166), membuat suatu gambaran tentang Pemidanaan yang bersifat pencegahan khusus ini.

1. Pidana selalu dilakukan untuk pencegahan khusus, yakni untuk menakut-nakuti orang-orang yang dapat dicegah dengan cara menakut-nakutinya melalui penjatuhan pidana itu agar ia tidak melakukan niat jahatnya.
2. Akan tetapi, bila ia tidak dapat lagi ditakut-takuti dengan cara menjatuhkan pidana, penjatuhan pidana harus bersifat memperbaiki dirinya.
3. Apabila bagi penjahat tersebut tidak dapat lagi diperbaiki, penjatuhan pidana harus bersifat membinasakan atau membuat mereka tidak berdaya.

4. Tujuan satu-satunya dari pidana adalah mempertahankan tata tertib hukum didalam masyarakat.

c. Teori Gabungan atau Campuran

Teori gabungan ini berdasarkan pidana pada asas Pembalasan dan asas Pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungannya dapat dibedakan yaitu sebagai berikut :

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh berat dari perbuatan yang dilakukan terpidana.

Menurut Simons (Adami Chazawi:2008:167)menjelaskan bahwa:

Dasar primer pidana adalah pencegahan umum, dasar sekundernya adalah pencegahan khusus, pidana terutama ditujukan pada pencegahan umum yang terletak pada ancaman pidananya dalam undang-undang.

Menurut Thomas Aquinas (Adami Chazawi:2008:167) menjelaskan bahwa:

Dasar itu ialah kesejahteraan umum.Untuk adanya pidana harus ada kesalahan pada pelaku perbuatan dan kesalahan itu hanya terdapat pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sukarela.

Menurut Vos (Adami Chazawi:2008:168), yang berpandangan

bahwa:

Dengan menakut-nakuti dari pidana tidak hanya terletak pada pencegahan umum yaitu tidak hanya pada ancaman pidananya tetapi juga pada penjatuhan pidana secara kongkret oleh hakim.

E. Dasar Pertimbangan Hakim

Pidana hanya dapat dijatuhkan apabila ada kesalahan terdakwa, yang dibuktikan di sidang pengadilan. Kesalahan terdakwa tentunya sebagaimana yang termaktub dalam dakwaan penuntut umum.

Terdakwa bukan begitu saja dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, tetapi harus didukung oleh alat bukti minimum yang sah. Alat bukti minimum itu harus dapat meyakinkan Hakim akan kesalahan terdakwa. Setelah itu, barulah pidana dapat dijatuhkan. Hal itu sesuai dengan rumusan Pasal 183 KUHP yang menegaskan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Dalam hal itu, Undang-undang menghendaki adanya minimum alat bukti yaitu dua alat bukti yang dapat meyakinkan Hakim akan kesalahan terdakwa dan tindak pidana yang dilakukannya.

Maksud sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut adalah minimal dua alat bukti yang sah menurut KUHP Pasal 184 ayat (1)

KUHAP, menyebut alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Praktek sehari-hari, baik oleh Penuntut Umum maupun Hakim, faktor-faktor yang dikemukakan dalam tuntutan dan penjatuhan pidana adalah dua hal pokok yaitu hal-hal yang *meringankan* dan *memberatkan*. Faktor-faktor yang meringankan antara lain, terdakwa masih muda, berlaku sopan, dan mengakui perbuatannya. Faktor-faktor yang memberatkan antara lain memberi keterangan yang berbelit-belit, tidak mengakui perbuatannya, meresahkan masyarakat, merugikan Negara, dan sebagainya.

- Yang meringankan.

Pengurangan hukuman berdasarkan ketentuan uu (Leden Marpaung, 2005: 113) adalah sebagai berikut :

1. Dalam hal umur yang masih muda (*incapacity or infacy*), berdasarkan pasal 47 ayat (1) KUHPidana yang rumusannya sebagai berikut.
“Jika Hakim menghukum anak yang bersalah itu, maka maksimum hukuman pokok bagi tindak pidana itu, dikurangi sepertiga.”
2. Dalam hal percobaan melakukan kejahatan, berdasarkan Pasal 53 ayat (2) KUHPidana yang rumusannya sebagai berikut.
“Maksimum hukuman pokok yang ditentukan atas kejahatan itu dikurangi sepertiganya dalam hal percobaan.”

3. Dalam hal membantu melakukan kejahatan, berdasarkan Pasal 57 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut.
“Maksimum hukuman pokok yang ditentukan atas kejahatan itu, dikurangi sepertiga bagi pembantu.”

- Yang Memberatkan

Penambahan hukuman berdasarkan Undang-undang ditentukan sebagai berikut :

1. Dalam hal *Concursus*, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 65

KUHPidana :

- (1). Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;
- (2). Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana-pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, akan tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiganya.”

Dan Pasal 66 KUHPidana yang rumusannya:

- (1). Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.
- (2) Dalam hal ini pidana denda dihitung menurut lamanya maksimum pidana kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu.”

2. Dalam hal *Recidive*, Berdasarkan Pasal 486, 487, dan 488 KUHPidana.

Pedoman pemidanaan dalam RUU KUHPidana :

Pasal 55

(1) Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan ;

- a. Kesalahan pembuat tindak pidana.
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana.
- c. Sikap batin pembuat tindak pidana
- d. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.
- e. Cara melakukan tindak pidana.
- f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana
- g. Riwayat hidup dan keadaan social dan ekonomi pembuat tindak pidana.
- h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana.
- i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban.
- j. Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya dan/atau.
- k. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

(2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian,

dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertibangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data-data dan informasi yang dibutuhkan, maka Penulis memilih lokasi penelitian di Watampone yaitu tepatnya di Pengadilan Negeri Watampone. Tempat penelitian tersebut dipilih oleh

Penulis, karena dianggap berkesesuaian dengan judul yang diangkat oleh Penulis.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini digolongkan dalam 2 (dua) bagian yaitu :

1. Data primer, merupakan data yang diperoleh melalui penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara wawancara dengan pihak terkait sehubungan dengan Penulisan skripsi ini, dalam hal ini Hakim Pengadilan Negeri Watampone.
2. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum, karangan ilmiah, dan bacaan-bacaan lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam Penulisan ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan pembahasan tulisan ini, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Pengumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa dokumen dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan ini ditempuh dengan cara: yaitu pertama melakukan observasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara pengamatan langsung dengan objek penelitian. Kedua, dengan cara wawancara (*interview*) langsung kepada hakim Pengadilan Negeri Watampone yang menangani kasus tersebut

D. Analisa Data

Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian dianalisis secara kuantitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat dengan penelitian ini.

Penggunaan teknik analisis kuantitatif mencakup semua data yang telah diperoleh, sehingga membentuk deskripsi yang mendukung kualifikasi kajian ini. Teknik analisis data yang digunakan dengan pendekatan kualitatif, menjawab dan memecahkan serta pendalaman secara menyeluruh dan utuh dari objek yang diteliti.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Secara Bersama-sama (Studi Kasus Putusan No. 281/Pid.B/2012/PN.Watampone).

1. Posisi Kasus

Bahwa awalnya sekitar pukul 08.00 Wita terdakwa I hendak kekebun miliknya yang terletak di Dusun II Polewali Desa Polewali Kec. Libureng Kab. Bone diperkirakan \pm 200 m dari rumah Terdakwa I untuk mencangkul atau menggarap kebunnya. Didalam perjalanan Terdakwa I bertemu dengan terdakwa II yang sementara berada depan rumahnya dan pada saat itu juga Terdakwa II langsung mencegat Terdakwa I dan mengatakan " engka Petta nabba ambo di ahang"(ada Petta Nabba Ambo disana) selanjutnya Terdakwa I tidak mengucapkan sepatah kata pun langsung menuju kebun tersebut dan terdakwa II mengikutinya, sesampainya dikebun tersebut Terdakwa II melihat ada beberapa batang pisang miliknya telah ditebang oleh korban Andi tukang alias Petta nabba dan setelah mendekati pagar kebun tersebut korban mengatakan "ajna mattama mae taneng-tanengku maneng dimae'(tidak usah masuk karena tanaman saya semua di sini). Selanjutnya Terdakwa I mengatakan "iga pale tanengingi kalukue"(siapa yang tanam ini kelapa) lalu korban kembali mengatakan "dimonri ro,elo matoka mammatengiki tanae pakenano ko

eloko”(dibelakangpi, saya memang mau mati demi tanah ini kau memukul saya kalau mau) lalu terdakwa I mengatakan “laono pale ajjama nasicappu tawwe ko dih’(kalau begitu kau kerja saja supaya kita saling menghabisi di sini)terdakwa I mendekati korban dan terdakwa II kebelakang korban sehingga korban memukul pelipis kanan Terdakwa I dengan tongkat yang dipegang olehnya kemudian Terdakwa I mengayunkan cangkul yang dipegang olehnya kearah korban yang mengenai lutut korban sehingga dan pada saat itu pula Terdakwa II dengan tangan kirinya dengan menggunakan parang langsung menebas leher korban dari belakang sebanyak satu kali dan mengenai leher sebelah kanannya sehingga korban langsung roboh dan tergeletak di tanah.

Akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, korban Andi Tukang alias Petta Nabba Bin Andi Mattalatta meninggal dunia karena mengalami luka pangkal leher bahu kanan dan vertebrata sefikasi/tulang pangkal leher terpotong.

2. Dakwaan jaksa penuntut umum

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa I Lel. Ape Bin Angku alias Baco dongke dan terdakwa II. Lel. Mappiati Bin Ape Pada hari Minggu tanggal 01 April 2012 kira-kira pukul 08 wita atau disekitar waktu itu dalam bulan April 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam kurung tahun 2012, bertempat di

dusun II Polewali Desa Polewali Kec. Libureng Kab. Bone atau disuatu tempat lain dalam daerah huku pengadilan negeri Watampone, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan pembunuhan terhadap diri korban Lel. Andi Tukang alias Petta Nabba Bin Andi Mattalatta yang mengakibatkan korban meninggal dunia yang mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut.

Bahwa awalnya sekitar pukul 08.00 Wita terdakwa I hendak kekebun miliknya yang terletak di Dusun II Polewali Desa Polewali Kec. Libureng Kab. Bone diperkirakan \pm 200 m dari rumah Terdakwa I untuk mencangkul atau menggarap kebunnya. Didalam perjalanan Terdakawa I bertemu dengan terdakwa II yang sementara berada depan rumahnya dan pada saat itu juga Terdakwa II langsung mencegat Terdakwa I dan mengatakan " engka Petta nabba ambo di ahang"(ada Petta Nabba Ambo disana) selanjutnya Terdakwa I tidak mengucapkan sepatah kata pun langsung menuju kebun tersebut dan terdakwa II mengikutinya, sesampainya dikebun tersebut Terdakwa II melihat ada beberapa batang pisang miliknya telah ditebang oleh korban Andi tukang alias Petta nabba dan setelah mendekati pagar kebun tersebut korban mengatakan "ajna mattama mae taneng-tanengku maneng dimae'(tidak usah masuk karena tanaman saya semua di sini). Selanjutnya Terdakwa I mengatakan "iga pale tanengingi kalukue"(siapa yang tanam ini kelapa) lalu korban kembali mengatakan "dimonri ro,elo matoka mammatengiki tanae pakenano ko eloko"(dibelakangpi, saya memang mau mati demi tanah ini kau memukul saya kalau mau) lalu terdakwa I mengatakan "laono pale ajjama nasicappu tawwe ko dih'(kalau begitu kau kerja saja supaya kita saling menghabisi di sini)terdakwa I mendekati korban dan terdakwa II kebelakang korban sehingga korban memukul pelipis kanan Terdakwa I dengan tongkat yang dipegang olehnya kemudian Terdakwa I mengayunkan cangkul yang dipegang olehnya kearah korban yang mengenai lutut korban sehingga dan pada saat itu pula Terdakwa II denga tangan kirinya dengan menggunakan parang langsung menebas leher korban dari belakang sebanyak satu kali dan mengenai leher sebelah kanannya sehingga korban langsung roboh dan tergeletak di tanah.

Akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, korban Andi Tukang alias Petta Nabba Bin Andi Mattalatta meninggal dunia karena mengalami luka pangkal leher bahu kanan dan vertebrata sefikasi/tulang pangkal leher terpotong, berdasarkan Surat Visum Et Revertum No. 189/PKM-LB/V/2012 tanggal 10 Mei 2012 yang ditanda tangani oleh dr.R.Mochtar A.R.Tjie

Perbuatan mereka terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa I Lel. Ape Bin Angku alias Baco Dongke dan terdakwa II. Lel. Mappiati Bin Ape Pada hari Minggu tanggal 01 April 2012 kira-kira pukul 08 wita atau disekitar waktu itu dalam bulan April 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam kurung tahun 2012, bertempat di dusun II Polewali Desa Polewali Kec. Libureng Kab. Bone atau disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan pembunuhan terhadap diri korban Lel. Andi Tukang alias Petta Nabba Bin Andi Mattalatta yang mengakibatkan korban meninggal dunia yang mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut.

Bahwa awalnya sekitar pukul 08.00 Wita terdakwa I hendak kekebun miliknya yang terletak di Dusun II Polewali Desa Polewali Kec. Libureng Kab. Bone diperkirakan \pm 200 m dari rumah Terdakwa I untuk mencangkul atau menggarap kebunnya. Didalam perjalanan Terdakawa I bertemu dengan terdakwa II yang sementara berada depan rumahnya dan pada saat itu juga Terdakwa II langsung mencegat Terdakwa I dan mengatakan " engka Petta nabba ambo di ahang"(ada Petta Nabba Ambo disana) selanjutnya Terdakwa I tidak mengucapkan sepatah kata pun langsung menuju kebun tersebut dan terdakwa II mengikutinya, sesampainya dikebun tersebut Terdakwa II melihat ada beberapa batang pisang miliknya telah ditebang oleh korban Andi tukang alias Petta nabba dan setelah mendekati pagar kebun tersebut korban mengatakan "ajana mattama mae taneng-tanengku maneng dimae'(tidak usah masuk karena tanaman saya semua di sini). Selanjutnya Terdakwa I mengatakan "iga pale tanengingi kalukue"(siapa yang tanam ini kelapa) lalu korban kembali mengatakan "dimonri ro,elo matoka mammatengiki tanae pakenano ko eloko"(dibelakangpi, saya memang mau mati demi tanah ini kau memukul saya kalau mau) lalu terdakwa I mengatakan "laono pale ajjama nasicappu tawwe ko dih'(kalau begitu kau kerja saja supaya kita saling menghabisi di sini)terdakwa I mendekati korban dan terdakwa II kebelakang korban sehingga korban memukul pelipis kanan Terdakwa I dengan tongkat yang dipegang olehnya kemudian Terdakwa I mengayunkan cangkul yang dipegang olehnya kearah korban yang mengenai lutut korban sehingga dan pada saat itu pula Terdakwa II denga tangan kirinya dengan menggunakan parang

langsung menebas leher korban dari belakang sebanyak satu kali dan mengenai leher sebelah kanannya sehingga korban langsung roboh dan tergeletak di tanah.

Akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, korban Andi Tukang alias Petta Nabba Bin Andi Mattalatta meninggal dunia karena mengalami luka pangkal leher bahu kanan dan vertebrata sefikasi/tulang pangkal leher terpotong, berdasarkan Surat Visum Et Revertum No. 189/PKM-LB/V/2012 tanggal 10 Mei 2012 yang ditandatangani oleh dr.R.Mochtar A.R.Tjie

Perbuatan mereka terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana.

3. Tuntutan Jaksa penuntut umum

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone Yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I.Ape Bin Angku dan Terdakwa II.Mappiati Bin Ape terbukti bersalah melakukan tindak pidana menghilangkan jiwa orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I.ape Bin Angku berupa pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa II.Mappiati Bin Ape berupa pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang yang panjangnya 5,3 cm dan lebar ujung panjang 0,4 cm dan gagangnya serta warangkanya terbuat dari kayu.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) sandal warna tali coklat dan alasnya berwarna hitam.
- 1 (satu) buah tongkat kayu dengan panjang 87 cm dan diameter pegang 0,3 cm serta diameter ujung 0,4, dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah sandal berwarna hitam dengan merk New Era

- 1 (satu) buah topi merk Skater warna coklat/bergaris hitam putih
Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak.
- 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

4. Analisis Penulis

Menurut penulis surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum telah memenuhi syarat formal dan materil surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 143 ayat (2) KUHP, yaitu harus memuat tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum serta identitas lengkap terdakwa, selain itu juga harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Penyusunan surat dakwaan penuntut umum harus bersifat cermat atau teliti terutama yang berkaitan dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar tidak terjadi kekurangan dan/atau kekeliruan yang mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau unsur-unsur dalam dakwaan tidak berhasil dibuktikan.

Terdakwa dalam kasus ini berdasarkan surat dakwaan penuntut umum, dikenakan Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana. Apabila dikaitkan dengan posisi kasus yang telah dibahas

sebelumnya maka unsur-unsur pidana yang harus dipenuhi agar perbuatan itu dapat dihukum, adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa

Unsur barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja yang merupakan subjek hukum berupa manusia, yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

2. Unsur dengan Sengaja

Unsur opzettelijk dalam rumusan suatu ini harus diartikan bawah kesengajaan itu ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakang opzettelijk itu. Oleh karena unsur sengaja ini dirumuskan dalam pasal 338 KUHPidana dengan mendahului unsure perbuatan menghilangkan nyawa orang lain, maka disini harus diartikan bawah petindak menghendaki untuk mewujudkan perbuatan, dan ia menghendaki terhadap matinya orang lain, serta ia sadar atau insyaf bahwa dari perbuatan yang dikehendaknya itu dapat menimbulkan kematian orang lain.

3. Unsur menghilangkan nyawa orang, karena pembunuhan biasa

Unsur menghilangkan nyawa orang lain, menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan adalah suatu delik materil. Delik materil adalah suatu delik yang melarang menimbulkan akibat tertentu (akibat yang dilarang atau akibat konsitutif/*consitutief gevolg*).

Untuk dapat terjadi atau timbulnya delik materil secara sempurna, tidak semata-mata digantungkan pada selesainya perbuatan, melainkan apakah dari wujud perbuatan itu telah menimbulkan akibat yang terlarang ataukah belum/tidak. Perbuatan menghilangkan nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif dan abstrak. Bentuk aktif, artinya mewujudkan perbuatan itu harus gerakan dari sebagian anggota tubuh, tidak diam atau pasif, walaupun sekecil apapun.

4. Unsur turut melakukan

Unsur turut melakukan atau *medeplegen* itu hanya dapat dianggap sebagai ada, yaitu apabila tindakan tiap-tiap peserta di dalam suatu tindak pidana dapat dianggap sebagai telah menghasilkan suatu *daderschap* secara sempurna. Unsur turut melakukan berarti suatu *opzettelijk medeplegen* atau suatu kesengajaan untuk turut melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain.

Berdasarkan uraian kejadian dalam surat dakwaan, semua unsur pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana yang didakwakan telah terpenuhi secara sah menurut hukum, maka terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya.

Mengenai tanggung jawab pidana yang dibebankan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana secara bersama-sama, terdakwa dibebani tanggung jawab yang sama dengan pelaku

lainnya, yakni masing-masing dibebani tanggung jawab yang sama dengan orang lain yang sendirian melakukan tindak pidana (*dader*).

Berdasarkan hasil analisis penulis, maka penulis berpendapat bahwa penerapan ketentuan pidana materil pada perkara ini yakni pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana telah tepat.

B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Secara Bersama-sama (Studi Kasus Putusan No. 281/Pid.B/2012/PN.Watampone).

1. Pertimbangan Hakim

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya jaksa penuntut umum dalam perkara ini telah mengajukan saksi-saksi yang member keterangan dibawah sumpah yaitu A. Sulhaedi Bin Petta Nabba dan Rining Binti Patoba.

Menimbang bahwa didalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang yang panjangnya 5,3 cm dan lebar ujung panjang 0,4 cm dan gagangnya serta warangkanya terbuat dari kayu.
- 1 (satu) sandal warna tali coklat dan alasnya berwarna hitam.
- 1 (satu) buah tongkat kayu dengan panjang 87 cm dan diameter pegangang 0,3 cm serta diameter ujung 0,4.
- 1 (satu) buah sandal berwarna hitam dengan merk New Era
- 1 (satu) buah topi merk Skater warna coklat/bergaris hitam putih

Serta bukti surat berupa Visum Et Revertum No. 189/PKM-LB/V/2012 dari dokter puskesmas Libureng.

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan

dipersidangan Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 01 April 202 sekitar pukul 08.00 Wita terjadi perkelahian antara Terdakwa I dan Terdakwa II melawan Petta Nabba yang mengakibatkan Petta Nabba meninggal dunia.
- Bahwa benar awalnya Petta Nabba lewat didepan rumah Terdakwa II menuju kebun, kemudian disusul oleh Terdakwa I lewat juga dan dilarang juga oleh Terdakwa II kekebun karena sudah ada Petta Nabba kekebun tapi Terdakwa I tetap juga pergi hingga Terdakwa II pergi mengambil parang mengikuti Terdakwa I kekebun.
- Bahwa benar di kebun tempat pertengkaran antara Terdakwa I dengan Petta Nabba kemudia dating Terdakwa II juga bertengkar dengan Petta Nabba lalu Terdakwa I mencangkul di sekitar kaki Petta Nabba hingga Petta Nabba memukul terdakwa I dengan tongkat pada bagian kepala, melihat Terdakwa I dipukuli Petta Nabba Terdakwa II mengayunkan parangnya kearah Petta Nabba tepat mengenai leher Petta Nabba hingga leher Petta Nabba mengalami luka pada leher dengan panjang 10 (sepuluh) cm lebar 8 (delapan) cm serta dalam 8 (delapan) cm serta korban juga meninggal dunia.
- Bahwa benar saat Petta Nabb jatuh setelah diparangi Terdakwa II, sempat Terdakwa I menindis korban dengan cangkul.
- Bahwa benar korban kemudian dibawa oleh anaknya kerumah lalu di oleh dokter puskesmas.

Menimbang bahwa apakah perbuatan para Terdakwa sebagaimana fakta hukum yang tertuis dipersidangan dapatlaj dipersalahkan terhadap para Terdakwa karean telah melakukan perbuatan sebagaimana yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan.

Menimbang bahwaa untuk menyatakan paa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang di dakwakan jaksa penuntut umum maka terlebih dahulu haruslah dibuktikan bahwa semua unsur-unsur dan pasal yang di dakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi.

Menimbang bahwa sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum para Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan alternative telah melakukan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

Menimbang bahwa oleh karena pera Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternative maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan salah satu dari kedua Pasal yang di dakwakan tersebut, sesuai kebijakan dan atau kewenangannya Majelis Hakim, olehnya tiu majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dari Pasal yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang bahwa adapun unsur-unsur dari pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa
2. Unsur dengan sengaja
3. Unsur menghilangkan nyawa orang lain
4. Unsur melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal dari dakwaan alternative kesatu yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terbukti terpenuhi, maka dengan demikian para Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti secara sah dan menyakinkan maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan alternative kedua sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut dibuat dalam bentuk dakwaan alternatif dimana apabila salah satu Pasal yang didakwakan telah terbukti maka dakwaan yang lainnya tidak dipertimbangkan lagi.

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, sedangkan selama persidangan tidak ada fakta yang membuktikan adanya alasan penghapusan pidana, baik alasan pembenaran maupun alasan pemaaf, maka terhadap para Terdakwa haruslah tetap dijatuhi pidana sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah serta memenuhi syarat yang ditentukan Undang-undang untuk ditahan maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa telah ditahan maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya atas pidana yang akan dijatuhkan terhadapnya.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang yang panjangnya 5,3 cm dan lebar ujung panjang 0,4 cm dan gagangnya serta warangkanya terbuat dari kayu dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) sandal warna tali coklat dan alasnya berwarna hitam, 1 (satu) buah tongkat kayu dengan panjang 87 cm dan diameter pegangan 0,3 cm serta diameter ujung 0,4, dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) buah sandal berwarna hitam dengan merk New Era, 1 (satu) buah topi merk Skater warna coklat/bergaris hitam putih masing-masing dikembalikan kepada yang berhak.

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pada diri dan perbuatan para Terdakwa.

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga serta menyesali perbuatannya.

Hal yang memberatkan :

- Terdakwa telah mengilangkan nyawa orang lain.

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti bersalah maka para Terdakwa akan dibebani untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan.

2. Amar Putusan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Ape Bin Angku alias Baco Dongke dan Terdakwa II Mappiati Bin Ape terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan secara bersama-sama”
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 14 (empat belas) tahun.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) bilah parang yang panjangnya 5,3 cm dan lebar ujung panjang 0,4 cm dan gagangnya serta warangkanya terbuat dari kayu.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) sandal warna tali coklat dan alasnya berwarna hitam.
 - 1 (satu) buah tongkat kayu dengan panjang 87 cm dan diameter pegangan 0,3 cm serta diameter ujung 0,4, dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah sandal berwarna hitam dengan merk New Era
 - 1 (satu) buah topi merk Skater warna coklat/bergaris hitam putih
Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak.
6. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

3. Analisis Penulis

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (*vonnis*) yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman), dan di dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Dalam upaya membuat putusan serta menjatuhkan sanksi pidana, hakim harus mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal perbuatan hukum pidana, dan pertimbangan nonyuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang memuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim dalam menentukan putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan dalam hal ini bukti-bukti, keterangan saksi, pembelaan terdakwa, surat tuntutan jaksa maupun muatan psikologis. Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dapat didasari oleh tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, dan profesionalisme.

Berdasarkan hasil analisis penulis, maka berpendapat bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada perkara ini telah sesuai dan tepat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan Oleh Penulis, maka Penulis berkesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan hukum materiil dalam putusan No. 281/Pid.B/2012/PN.Watampone adalah tepat. Jaksa Penuntut Umum menggunakan Dakwaan Alternative yaitu Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana atau Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana. Diantara unsur-unsur Pasal yang didakwakan Oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan adalah Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, karena antara perbuatan dan unsur-unsur Pasal saling mencocoki.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku dalam perkara putusan Nomor :281/ Pid.B/ 2012/ PN.Watampone telah sesuai karena berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti serta adanya pertimbangan-pertimbangan yuridis, hal-hal yang meringankan dan memberatkan.

B. Saran.

1. Jaksa Penuntut umum harus teliti dan cermat dalam menyusun surat dakwaan, mengingat surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang dihadapkan di muka persidangan, selain itu, juga harus mempunyai pengetahuan atau ilmu tentang hukum dengan baik, bukan hanya hukum secara formil, melainkan juga hukum secara materiil agar tidak salah dalam menentukan mana perbuatan yang sesuai dengan unsur yang didakwakan.
2. Hakim tidak serta merta berdasar pada surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam menjatuhkan Pidana, melainkan pada dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim. Hakim harus lebih peka untuk melihat fakta-fakta apa yang timbul pada saat persidangan, sehingga dari fakta yang timbul tersebut, menimbulkan keyakinan hakim bahwa terdakwa dapat atau tidak dapat dipidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, wahyu,2007. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa. Cetakan kedua.* Gunung Aksara. Bandung.
- Chazawi, Adami,2001. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- _____,2002, *Pelajaran Hukum Pidana 3 (Percobaan & Penyertaan)*,PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____,2008. *Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*. PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Effendy, Rusli,1983. *Manusia dan Kejahatan*. Lembaga Kriminologi. Unhas. Ujung Pandang.
- Farid, A.Z. Abidin ,1995, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian 1*, Alumni, Bandung
- Huda, Chairul,2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti : Bandung.
- Marpaung, Leden,1991. *Unsur-unsur perbuatan yang dapat di hukum (Delik)*. Sinar Grafika.
- _____,2005. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta
- Mulyadi, Lilik,2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti..
- Poernomo, Bambang, 1982. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Ghalilea Indonesia.
- Poerwardaminta.W.J.S,1985. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.

Prodjodikoro, Wirjono, 2003: *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Refika Aditama. Bandung.

Siregar, Bismar, 1983. *Hukum Acara Pidana*. Bina Cipta. Jakarta.

Soesilo, R. 1995. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Politea : Bogor.

Tongat ,2009. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Pres, Bandung.

Waluyo, Bambang. 2008. *Pidana dan Pemindaan*, Sinar Grafika : Jakarta